



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA YUSTINA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 624136

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA SERDANG BEDAGAI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA KOTA TEBING TINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA TEBING TINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TEBING TINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA TEBING TINGGI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA TEBING TINGGI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 964.580.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. MOTOR, YAMAHA ALL NEW XSR 155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 36.580.000



3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.776.918.977
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.371.498.977

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.371.498.977

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.